

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Fakta yang terjadi di lapangan yang diperoleh dari situs resmi BPK (<http://www.bpk.go.id>) menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 533 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS I tahun 2016 menemukan 6.150 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan meliputi 6.016 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri dari permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp1,17 triliun, potensi kerugian daerah sebesar Rp538,88 miliar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp809,01 miliar. Selain itu terdapat permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial berupa penyimpangan administrasi.

Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern sudah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan dalam sistem pengendalian internnya, yaitu terhadap keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem

pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, perencanaan kegiatan belum memadai, terlambat dalam menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai serta belum didukung sumber daya manusia yang memadai. Terhadap kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta kepada pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Yang pertama, Indriasari (2008) meneliti topik ini dengan objek yakni Kota Palembang menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan variabel sumber daya manusia tidak berpengaruh. Namun, penelitian Choirunnisah (2008) menemukan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan di SKPD Kota Malang. Selain itu, Lubis (2014) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan kualitas SDM, pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif secara

parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Pakarta (2015) di Pemerintahan Daerah Kota Medan. Pakarta (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan faktor eksternal tidak mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian intern mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan.

Beberapa penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda-beda terhadap pengaruhnya, sehingga dalam penelitian ini bermaksud menguji kembali beberapa variabel independen dan variabel dependen pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lubis (2014) dengan objek penelitian yang berbeda yaitu pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Alasan dipilihnya pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara oleh karena berdasarkan IHPS I Tahun 2016 yang diterbitkan BPK diakses melalui (<http://www.bpk.go.id>), untuk yang pertama kalinya sejak Kabupaten Toraja Utara berdiri sendiri pada tahun 2008, akhirnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan daerah telah mengelola laporan keuangannya secara akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan meneliti faktor-faktor yang yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian**

Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara?
2. Apakah pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Toraja Utara?
4. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Toraja Utara?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali penelitian Lubis (2014) dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan” dengan menggunakan objek yang berbeda yaitu Kabupaten Toraja Utara.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi ini bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan saran bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.